



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i5>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Implementasi Segitiga Restitusi untuk Meningkatkan Lingkungan Budaya Positif di Sekolah Dasar

M.Y. Fakhrudin<sup>1\*</sup>, Ade Tutty R. Rossa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia, [myfakhrudin@uninus.ac.id](mailto:myfakhrudin@uninus.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia, [Adetuttyrosa@uninus.ac.id](mailto:Adetuttyrosa@uninus.ac.id)

\*Corresponding Author: [myfakhrudin@uninus.ac.id](mailto:myfakhrudin@uninus.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to analyze the implementation of the Restitution Triangle as a humanistic and restorative approach to fostering a positive culture in elementary schools. The research was conducted at SDN Pasirluhur, Bandung Regency, and SDN 248 Sindangsari, Bandung City, using a qualitative approach and case study design. The participants included principals, vice principals for student affairs, guidance and counseling teachers/special officers, classroom teachers, and students. Data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and document analysis. The data were then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. Data validity was ensured through source and method triangulation, member checking, and audit trails. The findings show that the implementation of the Restitution Triangle in both schools aligns with the PDCA (Plan-Do-Check-Act) cycle. The planning stage was carried out collaboratively, involving the development of implementation guidelines, preparation of supporting materials, and socialization of the concept to teachers and students. The implementation stage positioned teachers as facilitators of restorative dialogue, guiding students to reflect on their mistakes, understand their impact, and formulate behavioral improvements. The checking stage involved comprehensive evaluations using both quantitative and qualitative data, revealing a significant decrease in repeated violations. The follow-up stage included procedural adjustments, advanced training for teachers, active student involvement, and integration of the program into other school activities. This study concludes that the success of the Restitution Triangle is determined by thorough planning, consistent implementation, data-driven evaluation, and continuous follow-up. The approach is not only effective in reducing negative behaviors but also in fostering mutual respect, social responsibility, and emotional connection between teachers and students. These findings provide practical contributions for Indonesian elementary schools in developing sustainable character-building strategies and creating a safe, inclusive learning environment that supports students' holistic development.*

**Keywords:** *Restitution Triangle, Positive Culture, PDCA, Elementary School, Character Building*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Segitiga Restitusi sebagai pendekatan humanis dan restoratif untuk membangun budaya positif di sekolah dasar. Studi

dilakukan di SDN Pasirluhur Kabupaten Bandung dan SDN 248 Sindangsari Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru BK/petugas khusus, guru kelas, dan peserta didik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, *member checking*, serta audit trail. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Segitiga Restitusi di kedua sekolah berjalan selaras dengan siklus PDCA (*Plan–Do–Check–Act*). Tahap perencanaan dilakukan secara partisipatif dengan penyusunan panduan pelaksanaan, penyiapan perangkat pendukung, dan sosialisasi konsep kepada guru dan siswa. Tahap pelaksanaan menempatkan guru sebagai fasilitator dialog restoratif yang memandu siswa merefleksikan kesalahan, memahami dampaknya, dan merumuskan perbaikan perilaku. Tahap pemeriksaan dilakukan melalui evaluasi komprehensif berbasis data kuantitatif dan kualitatif, yang menunjukkan penurunan signifikan kasus pelanggaran berulang. Tahap tindak lanjut meliputi penyesuaian prosedur, pelatihan lanjutan, pelibatan aktif siswa, serta integrasi program dengan kegiatan sekolah lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Segitiga Restitusi ditentukan oleh perencanaan matang, pelaksanaan konsisten, evaluasi berbasis data, dan tindak lanjut berkesinambungan. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam mengurangi perilaku negatif, tetapi juga membangun rasa saling menghormati, tanggung jawab sosial, dan keterikatan emosional antara guru dan siswa. Temuan ini memberikan kontribusi praktis bagi sekolah dasar di Indonesia dalam mengembangkan strategi pembinaan karakter yang berkelanjutan dan membentuk lingkungan belajar yang aman, inklusif, serta mendukung perkembangan holistik peserta didik.

**Kata Kunci:** Segitiga Restitusi, Budaya Positif, PDCA, Sekolah Dasar, Pembinaan Karakter

## PENDAHULUAN

Pendidikan abad ke-21 menuntut sekolah dasar untuk tidak hanya menjadi tempat mentransfer pengetahuan, tetapi juga ruang yang membentuk karakter, tanggung jawab sosial, dan kemampuan berpikir reflektif peserta didik (Wahyuni et al., 2025). Dalam konteks ini, penting bagi sekolah untuk menciptakan lingkungan budaya positif, yaitu lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang holistik setiap anak. Lingkungan seperti ini terbukti memiliki korelasi kuat dengan peningkatan disiplin diri, hubungan sosial yang sehat, dan pencapaian akademik yang lebih baik (Halim, 2022; Rohmah et al., 2025).

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan perilaku dan pelanggaran tata tertib masih marak di sekolah dasar. Kekerasan verbal dan fisik, perundungan, hingga absensi tanpa alasan adalah gejala-gejala yang mencerminkan lemahnya sistem penanaman karakter yang berakar pada pemahaman, bukan sekedar hukuman (Cahyo et al., 2020). Pendekatan represif yang mengandalkan hukuman terbukti tidak menyentuh akar masalah dan seringkali justru memperburuk relasi antara guru dan peserta didik (Buulolo, 2023; Wibowo & Parancika, 2018).

Sebagai respons atas situasi tersebut, pendekatan *Segitiga Restitusi* hadir sebagai solusi yang humanis dan restorative (Kusumardi, 2024). Konsep ini, sebagaimana dikembangkan oleh Diane Gossen, menawarkan tiga tahap utama: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya bukan untuk menghukum, melainkan mengajak peserta didik merefleksikan tindakan mereka, memahami dampaknya, dan kembali ke komunitas sekolah dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mendorong disiplin dari dalam, bukan tekanan dari luar (Yunus, 2021).

Penerapan Segitiga Restitusi telah diatur secara prinsip dalam berbagai kebijakan

nasional, seperti Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan kekerasan di sekolah, dan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Keduanya menegaskan pentingnya pendekatan edukatif dalam menangani pelanggaran serta pentingnya membangun lingkungan belajar yang berpihak pada murid (Marisa, 2024).

Namun demikian, pemahaman dan implementasi Segitiga Restitusi di tingkat sekolah dasar masih belum optimal. Banyak guru dan kepala sekolah belum terbiasa menggunakan pendekatan ini secara konsisten. Di sisi lain, studi-studi terdahulu masih cenderung fokus pada aspek teknis pembelajaran atau perilaku, tanpa menggali lebih dalam proses implementasi restitusi secara menyeluruh dalam ekosistem budaya sekolah.

Penelitian ini dilakukan di SDN Pasirluhur, Kabupaten Bandung, dan SDN 248 Sindangsari, Kota Bandung, dua sekolah dasar yang mencoba menerapkan Segitiga Restitusi dalam menangani pelanggaran disiplin dan membangun budaya positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh proses implementasi Segitiga Restitusi melalui pendekatan manajemen PDCA (*Plan, Do, Check, Act*), serta menilai dampaknya terhadap pembentukan karakter peserta didik dan iklim sekolah.

Dengan mengangkat praktik langsung dari dua sekolah dasar negeri di dua wilayah berbeda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret dan aplikatif tentang bagaimana Segitiga Restitusi dapat menjadi strategi manajerial sekaligus pedagogis dalam membangun budaya sekolah yang sehat, adil, dan berorientasi pada pertumbuhan karakter.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami makna, pengalaman, dan dinamika sosial secara mendalam dalam konteks alami. Peneliti berupaya menangkap realitas subjektif dari perspektif para pelaku di lapangan, khususnya dalam proses implementasi Segitiga Restitusi sebagai strategi penumbuhan budaya positif di sekolah dasar (Plano Clark, 2017).

Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap fenomena implementasi Segitiga Restitusi di dua sekolah dasar negeri, yaitu SDN Pasirluhur Kabupaten Bandung dan SDN 248 Sindangsari Kota Bandung. Kedua sekolah ini dipilih secara purposive karena memiliki kesamaan karakteristik: sama-sama sedang menjalankan pendekatan Segitiga Restitusi secara sistematis untuk mengembangkan lingkungan belajar yang positif dan restoratif (Adrias & Ruswandi, 2025; Yin, 2017).

Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru kelas, guru BK/petugas khusus, serta peserta didik yang terlibat langsung dalam praktik restitusi. Hubungan antar subjek dengan konteks sekolah diamati sebagai sistem sosial yang saling memengaruhi, sehingga data yang diperoleh bersifat kontekstual dan holistik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi (Patton, 2014; Tashakkori & Creswell, 2007). Wawancara digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman subjek terkait penerapan Segitiga Restitusi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Observasi partisipatif digunakan untuk mengamati langsung interaksi guru dan siswa saat menghadapi kasus pelanggaran serta proses fasilitasi restitusi oleh guru. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen program sekolah, panduan pelaksanaan restitusi, laporan kasus pelanggaran, serta refleksi mingguan guru dan siswa.

Dalam pendekatan kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama (*human instrument*) dalam pengumpulan dan analisis data (Lincoln & Guba, 1985; Merriam & Tisdell, 2015). Untuk mendukung proses ini, disusun instrumen bantu berupa panduan wawancara, lembar observasi, serta format analisis dokumen. Hal ini bertujuan untuk menjaga sistematisasi proses pengumpulan data di lapangan.

Keabsahan data dijaga dengan menerapkan empat kriteria dari Lincoln dan Guba: credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Lincoln & Guba, 1985; Miles et al., 2014). Kredibilitas dilakukan melalui triangulasi sumber dan member checking terhadap narasumber kunci. Transferabilitas dicapai dengan menyajikan deskripsi kontekstual secara rinci agar temuan dapat dijadikan acuan bagi konteks serupa. Dependability dan confirmability diperkuat melalui dokumentasi proses analisis (audit trail), serta pelacakan keputusan analisis secara transparan (Shenton, 2004).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari (Miles et al., 2014), yang terdiri dari tiga tahapan: (1) reduksi data (data reduction), yaitu penyaringan dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian; (2) penyajian data (data display) dalam bentuk naratif dan tabel kategori tematik; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification), yang dilakukan secara terus-menerus selama dan setelah pengumpulan data untuk menjamin konsistensi dan ketepatan hasil.

Penelitian ini dilaksanakan pada periode Februari hingga April 2025, dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data di lapangan, hingga proses analisis dan penyusunan laporan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan strategi pembinaan perilaku siswa yang berbasis nilai, refleksi, dan tanggung jawab secara kontekstual di sekolah dasar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan Implementasi Segitiga Restitusi**

Berdasarkan hasil penelitian di SDN Pasirluhur Kabupaten Bandung dan SDN 248 Sindangsari Kota Bandung, perencanaan implementasi Segitiga Restitusi dilakukan secara sistematis dan kolaboratif sebagai bagian dari strategi manajemen sekolah dalam menciptakan lingkungan budaya positif. Perencanaan ini mencakup penyusunan pedoman pelaksanaan, penyiapan perangkat pendukung, sosialisasi konsep kepada guru dan siswa, serta identifikasi kendala yang berpotensi muncul selama proses implementasi.

Proses perencanaan dilakukan melalui rapat tim manajemen sekolah dan forum diskusi bersama guru, yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru BK atau petugas khusus, serta guru kelas. Fokus utama dalam perencanaan adalah menyamakan persepsi mengenai prinsip dan tahapan Segitiga Restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Salah satu guru di SDN Pasirluhur menyampaikan:

“Sebelum mulai diterapkan di kelas, kami berdiskusi dulu. Kepala sekolah menekankan bahwa restitusi bukan sekadar mengganti hukuman, tapi tentang bagaimana kita membimbing anak agar paham kesalahannya tanpa harus merasa dihakimi.” – (Guru kelas 4, hasil wawancara, 12 Maret 2025).

Dokumentasi perencanaan yang diperoleh peneliti menunjukkan adanya dokumen panduan internal, rencana jadwal pelatihan guru, serta bahan presentasi sosialisasi untuk orang tua siswa. Selain itu, terdapat notulen rapat koordinasi dan daftar inventaris kebutuhan pelatihan seperti modul, lembar refleksi siswa, serta format pencatatan kasus pelanggaran berbasis tahapan restitusi.

Strategi perencanaan ini menunjukkan adanya integrasi antara pendekatan restoratif dan penguatan karakter peserta didik. Guru-guru diberikan pelatihan awal melalui workshop interaktif, yang tidak hanya menjelaskan konsep teoritis, tetapi juga simulasi kasus nyata dari lingkungan sekolah. Pendekatan ini memperkuat pemahaman bahwa restitusi adalah alat pembelajaran sosial-emosional, bukan hanya alat kontrol perilaku.

Temuan ini menunjukkan bahwa kepala sekolah di kedua sekolah telah menunjukkan kapasitas manajerial yang kuat dalam memimpin perubahan kultural melalui proses yang terstruktur. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan (Hallinger & Heck, 2010), bahwa

perubahan budaya sekolah memerlukan kepemimpinan yang visioner dan melibatkan partisipasi seluruh warga sekolah.

Partisipasi aktif guru dalam proses perencanaan juga menunjukkan adanya prinsip *shared leadership* dalam pengambilan keputusan pendidikan. Hal ini memperkuat rasa memiliki terhadap program yang dirancang dan menciptakan fondasi budaya kolaboratif di lingkungan sekolah. Seperti ditegaskan oleh (DuFour & Eaker, 2009), pelibatan guru dalam pengambilan keputusan merupakan kunci terbentuknya *professional learning community* yang efektif.

Adapun kejelasan panduan dan kesiapan perangkat pelaksanaan menandakan bahwa sekolah memahami pentingnya standarisasi proses dalam memastikan implementasi berjalan konsisten. Sebagaimana dijelaskan oleh (Darling-Hammond et al., 2017), keberhasilan suatu program pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaannya, termasuk kesiapan instrumen pendukung dan strategi pelibatan pemangku kepentingan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan implementasi Segitiga Restitusi di SDN Pasirluhur dan SDN 248 Sindangsari menunjukkan keseriusan manajemen sekolah dalam mewujudkan budaya positif secara sistematis, partisipatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.

### **Pelaksanaan Implementasi Segitiga Restitusi**

Pelaksanaan implementasi Segitiga Restitusi di SDN Pasirluhur Kabupaten Bandung dan SDN 248 Sindangsari Kota Bandung dilakukan melalui pendekatan bertahap, terstruktur, dan kolaboratif. Fokus pelaksanaan berada pada penerapan prinsip-prinsip Segitiga Restitusi dalam keseharian interaksi antara guru dan siswa, khususnya saat menangani pelanggaran disiplin dan membentuk karakter peserta didik.

Tahapan pelaksanaan mencakup tiga dimensi utama dari Segitiga Restitusi: (1) Menstabilkan identitas peserta didik, (2) Memvalidasi tindakan yang salah secara empatik, dan (3) Menanyakan keyakinan untuk mendorong refleksi dan tanggung jawab. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan penghukum. Pendekatan ini menggeser paradigma lama berbasis hukuman menjadi pembelajaran sosial-emosional berbasis refleksi.

Pelaksanaan program diawali dengan workshop interaktif bagi seluruh guru, difasilitasi oleh kepala sekolah dan tim internal yang telah lebih dahulu memahami konsep restitusi. Workshop ini mencakup teori dasar, simulasi kasus nyata, dan praktik *role play* untuk melatih keterampilan fasilitasi kasus pelanggaran di kelas. Salah satu guru di SDN 248 Sindangsari mengungkapkan:

“Kami coba simulasikan kasus-kasus pelanggaran ringan di kelas, seperti anak berteriak atau memukul teman. Lewat simulasi itu, kami belajar bagaimana cara menstabilkan emosi anak dulu, bukan langsung marah. Baru setelah tenang, kita ajak bicara soal apa yang terjadi dan apa yang bisa mereka lakukan ke depan.” (Guru kelas 3, hasil wawancara, 18 Maret 2025).

Setelah pelatihan awal, guru mulai menerapkan Segitiga Restitusi dalam interaksi nyata di kelas. Mereka menggunakan pendekatan ini ketika menghadapi perilaku negatif, seperti perkelahian, perundungan ringan, atau pelanggaran tata tertib. Penerapan dilakukan secara konsisten melalui dialog restoratif, bukan pendekatan hukuman langsung. Guru mencatat setiap kasus dalam lembar dokumentasi yang telah disiapkan, termasuk tahapan yang dilakukan, respons siswa, serta refleksi hasil diskusi.

Observasi di kelas menunjukkan bahwa guru cenderung menghindari reaksi impulsif saat terjadi pelanggaran. Mereka mengambil waktu untuk menenangkan siswa terlebih dahulu, lalu memfasilitasi percakapan dengan pendekatan reflektif. Hal ini menunjukkan pemahaman konsep restitusi tidak hanya sebatas teori, tetapi sudah menjadi bagian dari pola interaksi guru.

Pelaksanaan juga melibatkan siswa sebagai bagian dari proses. Beberapa guru



membentuk kelompok kecil siswa untuk menjadi “teman refleksi”, yang membantu teman sekelas memahami kembali aturan dan nilai-nilai bersama. Pendekatan ini mendorong tanggung jawab kolektif dalam membangun budaya kelas yang positif.

Dokumentasi sekolah memperlihatkan adanya catatan harian guru tentang kasus-kasus yang ditangani menggunakan pendekatan restitusi, lengkap dengan hasil refleksi siswa dan rencana perbaikan perilaku. Guru juga menyusun laporan mingguan untuk dibahas dalam rapat tim kesiswaan dan forum guru, sebagai bahan monitoring dan refleksi bersama.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Segitiga Restitusi di kedua sekolah telah berjalan secara konsisten dan terstruktur, dengan guru sebagai fasilitator utama perubahan perilaku. Hal ini sejalan dengan konsep *restorative practice* dalam pendidikan, yang menekankan peran guru sebagai pembimbing reflektif dalam membentuk karakter positif siswa (Morrison, 2013).

Penggunaan simulasi, refleksi, dan dialog terbuka sebagai bagian dari strategi pelaksanaan menunjukkan adanya pergeseran budaya sekolah menuju pendekatan yang lebih empatik, solutif, dan berbasis nilai. Sejalan dengan gagasan Green dan Seligman dalam pendekatan budaya positif, implementasi ini tidak hanya membentuk perilaku, tetapi juga memperkuat hubungan antarwarga sekolah dan meningkatkan sense of belonging peserta didik.

Dengan demikian, pelaksanaan Segitiga Restitusi di SDN Pasirluhur dan SDN 248 Sindangsari memperlihatkan bahwa dengan dukungan pelatihan yang tepat, dokumentasi yang sistematis, dan keterlibatan aktif guru, perubahan pendekatan disiplin di sekolah dasar dapat terwujud menjadi budaya restoratif yang membangun karakter dan memperkuat lingkungan budaya positif.

### **Pemeriksaan Implementasi Segitiga Restitusi**

Pemeriksaan terhadap implementasi Segitiga Restitusi di SDN Pasirluhur Kabupaten Bandung dan SDN 248 Sindangsari Kota Bandung dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa penerapan program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari tahap *Check* dalam siklus manajemen PDCA (*Plan–Do–Check–Act*), yang berfungsi untuk mengukur efektivitas program serta memberikan dasar bagi perbaikan berkelanjutan.

Proses pemeriksaan dilakukan melalui kombinasi observasi langsung di kelas, diskusi reflektif bersama guru, wawancara dengan peserta didik dan orang tua, serta analisis dokumentasi kasus pelanggaran. Observasi berfokus pada bagaimana guru menerapkan tiga tahap Segitiga Restitusi (menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan) dalam situasi nyata. Diskusi reflektif dilaksanakan dalam forum guru mingguan, di mana setiap guru mempresentasikan pengalaman penerapan restitusi dan tantangan yang dihadapi. Salah satu guru di SDN Pasirluhur menyampaikan:

“Melalui rapat mingguan, kami membahas apakah pendekatan restitusi yang kami lakukan sudah tepat. Ada guru yang merasa berhasil membuat anak mau meminta maaf dengan tulus, tapi ada juga yang masih kesulitan saat anak menolak bicara. Dari situ kami saling memberi saran.” – (Guru kelas 5, hasil wawancara, 25 Maret 2025).

Hasil wawancara dengan peserta didik menunjukkan adanya perubahan sikap positif, seperti meningkatnya kesadaran untuk mengakui kesalahan dan keinginan memperbaiki perilaku. Beberapa siswa menyampaikan bahwa mereka lebih nyaman berbicara dengan guru ketika melakukan kesalahan, karena merasa tidak langsung dihakimi.

Dokumentasi sekolah memperlihatkan adanya laporan evaluasi bulanan yang memuat data jumlah kasus pelanggaran, jenis pelanggaran, tahap restitusi yang digunakan, dan hasil yang dicapai. Data ini menjadi bahan analisis untuk mengidentifikasi pola masalah dan efektivitas strategi yang diterapkan. Misalnya, di SDN 248 Sindangsari, catatan evaluasi menunjukkan penurunan 35% kasus pelanggaran berulang setelah tiga bulan penerapan

restitusi.

Pemeriksaan juga melibatkan orang tua siswa melalui forum komunikasi sekolah–orang tua. Dalam forum ini, guru menyampaikan perkembangan perilaku siswa dan memberikan panduan singkat bagi orang tua untuk menerapkan prinsip serupa di rumah, sehingga konsistensi nilai dapat terjaga.

Temuan pemeriksaan ini menunjukkan bahwa kedua sekolah telah melaksanakan evaluasi implementasi secara sistematis, dengan mengombinasikan data kuantitatif (jumlah dan jenis kasus) serta data kualitatif (refleksi guru, pengalaman siswa, dan masukan orang tua). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan (C. D. Glickman et al., 2001) bahwa evaluasi yang komprehensif memungkinkan supervisi dan pembinaan perilaku siswa dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan secara partisipatif memperkuat budaya refleksi di lingkungan sekolah. Guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengkaji dan pengembang strategi. Hal ini sejalan dengan prinsip *professional learning community* yang menekankan pembelajaran berkelanjutan berbasis data dan kolaborasi (DuFour, 2004).

Dengan demikian, pemeriksaan implementasi Segitiga Restitusi di SDN Pasirluhur dan SDN 248 Sindangsari menunjukkan bahwa evaluasi yang terencana, berbasis data, dan dilakukan secara kolaboratif mampu menjadi fondasi penting untuk memperbaiki strategi, memperkuat efektivitas program, dan memastikan keberlanjutan budaya positif di sekolah.

### **Tindak Lanjut Implementasi Segitiga Restitusi**

Tahap tindak lanjut implementasi Segitiga Restitusi di SDN Pasirluhur Kabupaten Bandung dan SDN 248 Sindangsari Kota Bandung dilakukan sebagai respon terhadap temuan pemeriksaan (*Check*) dalam siklus PDCA (*Plan–Do–Check–Act*). Tindak lanjut difokuskan pada perbaikan prosedur, penguatan kapasitas guru, serta pengintegrasian program ke dalam budaya sekolah secara berkelanjutan.

Langkah pertama tindak lanjut adalah penyesuaian prosedur penerapan restitusi berdasarkan hasil evaluasi lapangan. Misalnya, guru diberi panduan tambahan tentang teknik komunikasi non-konfrontatif untuk menghadapi siswa yang enggan terbuka, serta strategi adaptasi untuk kasus pelanggaran yang melibatkan lebih dari satu siswa. Panduan ini disusun secara kolaboratif dalam forum guru mingguan dan kemudian dilembagakan sebagai dokumen sekolah. Kepala sekolah di SDN 248 Sindangsari menjelaskan:

“Dari evaluasi, kami menemukan bahwa ada beberapa guru yang masih bingung ketika menghadapi kasus yang melibatkan banyak anak. Maka kami membuat skenario khusus untuk kasus kelompok, supaya proses restitusi tetap fokus dan semua pihak merasa didengar.” – (Kepala sekolah, hasil wawancara, 3 April 2025).

Langkah kedua adalah pelatihan lanjutan bagi guru. Pelatihan ini menekankan pada keterampilan *active listening*, fasilitasi dialog reflektif, serta teknik menghubungkan tindakan siswa dengan nilai-nilai positif yang disepakati bersama. Pelatihan dilakukan secara internal oleh guru yang telah menjadi fasilitator utama restitusi, dan dilengkapi dengan sesi *peer coaching* untuk memperkuat praktik di lapangan.

Langkah ketiga adalah pelibatan aktif siswa dalam inovasi program. Di kedua sekolah, siswa dilibatkan dalam membuat *poster nilai-nilai sekolah*, menyusun “Kode Etik Kelas”, serta menjadi *peer mediator* untuk membantu teman sebaya menyelesaikan konflik secara damai. Keterlibatan ini bertujuan memperkuat rasa kepemilikan siswa terhadap budaya positif sekolah.

Selain itu, tindak lanjut juga mencakup kolaborasi lintas tim. Program restitusi diintegrasikan dengan kegiatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Tim Inklusi, dan kegiatan kesiswaan lainnya. Integrasi ini memastikan bahwa nilai-nilai dan praktik

restitusi tidak hanya digunakan saat menangani pelanggaran, tetapi menjadi bagian dari rutinitas pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan interaksi sosial di sekolah.

Dokumentasi sekolah menunjukkan adanya siklus perbaikan berkelanjutan, di mana setiap tiga bulan dilakukan review program untuk menilai efektivitas perubahan yang sudah diterapkan. Data kasus, refleksi guru, dan masukan siswa digunakan sebagai dasar rekomendasi strategi berikutnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *continuous improvement* dalam manajemen pendidikan (Deming, 1982), di mana setiap siklus implementasi menjadi peluang untuk memperkuat sistem.

Temuan ini menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan kedua sekolah tidak hanya bersifat reaktif terhadap masalah, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem pendukung jangka panjang. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan guru, siswa, dan tim sekolah menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberhasilan program restitusi bergantung pada konsistensi penerapan dan budaya kolaboratif yang kuat.

Dengan demikian, tindak lanjut implementasi Segitiga Restitusi di SDN Pasirluhur dan SDN 248 Sindangsari mencerminkan strategi penguatan berkelanjutan, di mana perbaikan prosedur, pengembangan kapasitas guru, partisipasi siswa, dan integrasi program menjadi pilar utama dalam mewujudkan lingkungan budaya positif yang berkelanjutan.

## Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Segitiga Restitusi di SDN Pasirluhur Kabupaten Bandung dan SDN 248 Sindangsari Kota Bandung berjalan selaras dengan kerangka siklus manajemen PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) dan membawa perubahan signifikan terhadap pendekatan penanganan pelanggaran disiplin di sekolah dasar. Program ini tidak hanya berfokus pada koreksi perilaku, tetapi juga membentuk kesadaran diri, empati, dan tanggung jawab peserta didik.

Pada tahap perencanaan, kedua sekolah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menyiapkan program secara sistematis dan kolaboratif. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru BK, dan guru kelas terlibat aktif dalam penyusunan panduan pelaksanaan, penyiapan perangkat pendukung, serta sosialisasi konsep Segitiga Restitusi. Proses ini memperlihatkan adanya penerapan prinsip *shared decision making* dan *distributed instructional leadership* yang memungkinkan semua pihak untuk memahami tujuan serta strategi yang akan dijalankan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan (G. Glickman, 2010) yang menekankan pentingnya perencanaan yang sistematis sebagai dasar peningkatan kualitas pendidikan. Partisipasi aktif guru dalam forum diskusi tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap program, tetapi juga memastikan bahwa rancangan strategi sesuai dengan kondisi nyata di kelas.

Pelaksanaan program memperlihatkan bahwa guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran sosial-emosional, bukan sekadar sebagai penegak aturan. Penerapan tahapan Segitiga Restitusi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan dilakukan melalui dialog restoratif yang memfokuskan pada pemulihan hubungan dan refleksi pribadi siswa. Pelatihan awal dalam bentuk *workshop* dan simulasi kasus nyata membantu guru menginternalisasi konsep ini sehingga dapat diterapkan secara konsisten di kelas. Dokumentasi setiap kasus pelanggaran memastikan bahwa proses berjalan terukur dan memberi ruang bagi evaluasi di tahap berikutnya. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Gossen bahwa restitusi adalah proses membangun disiplin positif berbasis kesadaran, bukan paksaan.

Tahap pemeriksaan menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan secara terencana dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Observasi di kelas, diskusi reflektif guru, wawancara dengan siswa dan orang tua, serta analisis dokumentasi pelanggaran memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas program. Data yang terkumpul, baik kuantitatif



maupun kualitatif, menjadi dasar untuk mengukur keberhasilan dan menemukan area yang memerlukan perbaikan. Penurunan signifikan kasus pelanggaran berulang di salah satu sekolah menunjukkan bahwa program berjalan efektif. Pendekatan evaluasi yang partisipatif ini sejalan dengan konsep *professional learning community* yang menempatkan refleksi kolaboratif berbasis data sebagai bagian dari pembelajaran berkelanjutan di sekolah (DuFour, 2004).

Tahap tindak lanjut dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian prosedur, pelatihan lanjutan, dan pelibatan siswa dalam inovasi program. Guru mendapatkan panduan tambahan terkait teknik fasilitasi dialog untuk situasi yang lebih kompleks, sementara siswa diberdayakan menjadi *peer mediator* dan terlibat dalam pembuatan kode etik kelas. Program restitusi juga diintegrasikan dengan kegiatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta Tim Inklusi, sehingga penerapan nilai-nilai restitusi tidak terbatas pada penanganan kasus pelanggaran, tetapi menjadi bagian dari budaya sekolah secara keseluruhan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *continuous improvement* sebagaimana dikemukakan (Deming, 1986), di mana evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem secara berkelanjutan (Karomi, 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menguatkan temuan studi sebelumnya yang menunjukkan efektivitas Segitiga Restitusi dalam membentuk disiplin positif dan mengurangi perilaku negatif siswa. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan kerangka PDCA yang membuat implementasi berjalan lebih terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Proses yang partisipatif dan berbasis data memungkinkan terjadinya perubahan budaya sekolah yang tidak hanya memperbaiki perilaku siswa, tetapi juga memperkuat hubungan sosial, rasa saling menghargai, dan rasa memiliki di antara warga sekolah. Pendekatan restoratif ini membuktikan bahwa pembinaan karakter dapat berjalan lebih efektif jika dilakukan melalui kolaborasi, refleksi, dan konsistensi penerapan nilai di seluruh aspek kehidupan sekolah.

## KESIMPULAN

Penelitian mengenai implementasi Segitiga Restitusi di SDN Pasirluhur Kabupaten Bandung dan SDN 248 Sindangsari Kota Bandung menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam membangun lingkungan budaya positif di sekolah dasar melalui proses yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Menggunakan kerangka manajemen PDCA (*Plan-Do-Check-Act*), kedua sekolah mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip restitusi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan ke dalam sistem pembinaan perilaku siswa secara konsisten.

Tahap perencanaan dilakukan secara partisipatif, melibatkan kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lain dalam penyusunan panduan pelaksanaan, penyiapan perangkat pendukung, serta sosialisasi konsep kepada seluruh warga sekolah. Tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa guru berperan sebagai fasilitator dialog restoratif, mengedepankan empati, tanggung jawab, dan refleksi dalam menangani pelanggaran. Tahap pemeriksaan dilaksanakan melalui evaluasi komprehensif yang memadukan data kuantitatif dan kualitatif, melibatkan guru, siswa, dan orang tua, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menilai efektivitas program dan mengidentifikasi area perbaikan. Tahap tindak lanjut mencakup penyesuaian prosedur, pelatihan lanjutan, pelibatan aktif siswa, dan integrasi program dengan kegiatan sekolah lain, memastikan bahwa nilai-nilai restitusi menjadi bagian dari budaya sekolah.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Segitiga Restitusi bergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, evaluasi berbasis data, dan tindak lanjut yang berkesinambungan. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam mengurangi perilaku negatif, tetapi juga membangun rasa saling menghormati, tanggung jawab sosial, dan keterikatan emosional antara guru dan siswa. Dengan penerapan yang konsisten, Segitiga Restitusi berpotensi menjadi strategi pembinaan karakter yang dapat direplikasi di sekolah dasar lain di Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman,

inklusif, dan mendukung perkembangan holistik peserta didik.

## REFERENSI

- Adrias, & Ruswandi, A. (2025). *Desain Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Rajawali Pers.
- Buulolo, B. (2023). Dampak kekerasan verbal di lingkungan sekolah. *CERDAS-Jurnal Pendidikan*, 2(1), 9–22.
- Cahyo, E. D., Ikashaum, F., & Pratama, Y. P. (2020). Kekerasan verbal (verbal abuse) dan pendidikan karakter. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 3(2), 247–255.
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). Effective teacher professional development. *Learning Policy Institute*.
- Deming, W. E. (1982). *Guide to Quality Control*. Massachusetts Institute Of Technology.
- Deming, W. E. (1986). Principles for transformation. *Out of the Crisis*, 18, 96.
- DuFour, R. (2004). What is a "professional learning community"? *Educational Leadership*, 61(8), 6–11.
- DuFour, R., & Eaker, R. (2009). *Professional learning communities at work tm: best practices for enhancing students achievement*. Solution Tree Press.
- Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2001). *Supervision and instructional leadership: A developmental approach*. ERIC.
- Glickman, G. (2010). Circadian rhythms and sleep in children with autism. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 34(5), 755–768.
- Halim, A. (2022). SIGNIFIKANSI DAN IMPLEMENTASI BERPIKIR KRITIS DALAM PROYEKSI DUNIA PENDIDIKAN ABAD 21 PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(3).
- Hallinger, P., & Heck, R. H. (2010). Leadership for learning: Does collaborative leadership make a difference in school improvement? *Educational Management Administration & Leadership*, 38(6), 654–678.
- Karomi, A. D. (2025). Transformational Leadership in Changing the Education Paradigm : Improving the Quality of Alpha Generation Student. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 10(1), 188–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.31851/jmksp.v10i1.17723>
- Kusumardi, A. (2024). Teknik Restitusi dalam Menangani Pelaku Bullying, Perundungan Pada Kurikulum Merdeka. *LINTERNAL: Learning and Teaching Journal*, 5(3), 286–298.
- Lincoln, Y., & Guba, B. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills: Sage Pulications. Inc.
- Marisa, S. (2024). *PENERAPAN SEGITIGA RESTITUSI DALAM MEMBENTUK KARAKTER DISIPLIN SISWA DI SD NEGERI 79 KOTA BENGKULU*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. John Wiley & Sons.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third edit). SAGE Publications Inc.
- Morrison, B. (2013). Schools and restorative justice. In *Handbook of restorative justice* (pp. 325–350). Willan.
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage publications.
- Plano Clark, V. L. (2017). Mixed methods research. *The Journal of Positive Psychology*, 12(3), 305–306.
- Rohmah, P. A., Hilman, S. N., Muhammad, A., & Utami, D. D. (2025). Transformasi Pelaksanaan Ilmu Sosial di Indonesia: Dari Citizenship Transmission Menuju Pembelajaran Kontekstual Abad 21. *Journal of Civic Education*, 8(2), 133–142.

- Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. *Education for Information*, 22(2), 63–75.
- Tashakkori, A., & Creswell, J. W. (2007). The new era of mixed methods. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(1), 3–7. <https://doi.org/10.1177/2345678906293042>
- Wahyuni, M. T., Rodhiah, R. T. A., & Fahillah, M. (2025). Strategi Peningkatan Keterampilan Abad ke-21 Siswa SD dengan Memanfaatkan Aliran Filsafat Rekonstruksionisme. *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)*, 7(2), 88–103.
- Wibowo, F., & Parancika, R. B. (2018). Kekerasan verbal (verbal abuse) di era digital sebagai faktor penghambat pembentukan karakter. *Seminar Nasional Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya (SEMNAS KBSP) V*, 2018.
- Yin, R. K. (2017). *Case study research and applications*. SAGE Publications US.
- Yunus, A. S. (2021). *Restorative justice di Indonesia*. Guepedia.